

April 2023



# *Buletin* BHINNEKA NARA EKA BHAKTI

*Edisi Halal-Bihalal*



# Daftar Isi

## 01 Redaksi

- Susunan Redaksi
- Salam Redaksi

## 02 Headline

- Presiden Jokowi : IPDN Diharapkan Dapat Menjadi Pilar Kemajuan Bangsa
- Strategi Pengelolaan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dalam Mewujudkan Kader Pamong Praja yang Profesional dan Berkelas Dunia

## 03 IPDN Corner

- Mari Mengetahui Visi, Misi dan Tujuan dari Sekolah Pencetak Motor Penggerak Bangsa
- Mari Mengetahui Visi, Misi dan Tujuan dari Sekolah Pencetak Motor Penggerak Bangsa
- Mari Mengetahui Visi, Misi dan Tujuan dari Sekolah Pencetak Motor Penggerak Bangsa
- Pemilu Tetap Dilaksanakan Tahun 2024 !!!
- Rektor IPDN Berharap Alumni IPDN Dapat Menempati Jabatan Strategis di Pemerintahan
- Arahan Presiden Jokowi pada Acara Dies Natalis ke-67 IPDN
- Mengetahui Lebih Dekat Laboratorium Berbasis Praktik Empiris Pemerintahan di Fakultas Politik Pemerintahan

## 04 Jelajah Ilmu

- Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur secara Sistematis melalui Refreshment dan Smart ASN dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia

## 05 Pengabdian Masyarakat

- Rangkaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam Rangka Dies Natalis ke-67 IPDN

## 06 Prajapedia

- Penampilan Drumband GAP Kampus Papua dalam HUT Kota Jayapura dan Rangkaian Kegiatan Dies Natalis ke-67 IPDN Kampus Kalimantan Barat
- Treasure Goes To IPDN 2023
- SAPAWARGA.ID Aplikasi Karya Praja IPDN yang Meraih Juara I Lomba Inovasi
- Kegiatan Praja di Bulan Ramadhan
- Budidaya Kangkung di IPDN Kampus Sulawesi Selatan

# Susunan Redaksi

## Penanggungjawab

Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M.

## Redaktur

Dr. Djoko Susilo

## Sekretariat

1. Dr. Deti Mulyati, S.H., M.H., CN.
2. Dr. Drs. Arief M. Edie, M.Si.
3. La Ode Muhamad Alam Jaya, S.STP., M.Si.
4. Sutiyo, S.STP., Ph.D.
5. Haris Wijayanto, S.STP.
6. Aestraiko Sujantor S. Rombe, S.STP, M.Si

## Penyunting / Editor

1. Yudha Mardhatillah, S.STP, M.Si
2. Febtado Abdiansyah, S.STP, M.Tr.IP
3. Levina Barinda Widyadhana, S.Tr.IP

## Desain Grafis

1. Eko Wiratmoko, S.STP, M.Tr.IP
2. M. Wahyu Adi Widyantoro, S.STP
3. Salahudin Ansari, S.Tr.IP
4. Khairatul Fatati, S.Tr.IP

## Fotografer

1. M. Fajar Farazi, A.Md
2. Ahmad Edwar Armandes, S.Kom
3. Ramdhani, A.Md
4. Arif Sapta Pamungkas

## Pembuat Artikel

1. Nindy M. Mayangswari, S.IKom, M.IKom
2. Indira Setia Ningtias, S.STP, M.Tr.IP
3. M. Aulia Addin, S.STP.
4. Jajang Rustoni, S.Sos
5. Tita Salati

# Salam Redaksi

Buletin Bhineka Nara Eka Bhakti adalah buletin internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terbit setiap 1 bulan sekali. Diambil dari bahasa Sansekerta, Bhineka Nara Eka Bhakti merupakan semboyan yang dianut praja IPDN yang bermakna “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu pengabdian”. Semboyan ini merupakan representasi dari tujuan didirikannya IPDN oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Maret 1956.

Saya harap buletin ini dapat menjadi wadah informasi, saluran komunikasi dan ajang aspirasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan praja di lingkungan IPDN. Buletin ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah bentuk apresiasi kami untuk semua Aparatur Sipil Negara dan praja IPDN yang telah berdedikasi tinggi bagi kemajuan IPDN. Selamat Membaca.

# HEADLINE

## Presiden Jokowi : IPDN Diharapkan

### Dapat Menjadi Pilar Kemajuan Bangsa

Jatinangor (17/03/2023) Genap berusia 67 tahun, IPDN diharapkan dapat menjadi pilar kemajuan bangsa yang selalu berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden RI Ir. Joko Widodo pada saat menyampaikan ucapan selamat atas dies natalis IPDN ke-67. Dalam pesannya Bapak Presiden berharap IPDN mampu beradaptasi menguasai ilmu, teknologi terbaru, memiliki kompetensi dan keahlian baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. "IPDN sebagai kampus pencetak pamong praja unggul tidak boleh tertinggal, harus bergerak cepat menyiapkan SDM yang kreatif dan inovatif, yang menguasai keahlian masa depan dan siap bekerja dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia", tuturnya. Selain Presiden RI, Ketua DPR RI dan MPR RI juga turut mengucapkan selamat atas dies natalis IPDN. Menurut Puan Maharani, IPDN memiliki tanggung jawab besar dalam menjadi tempat lahirnya pamong praja yang berkualitas, berdedikasi tinggi untuk menjadi pelayan rakyat. Untuk itu IPDN harus senantiasa meningkatkan kualitas para lulusannya. Sedangkan Ketua MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A menyampaikan bahwa Ia yakin IPDN terus berproses menjadi perguruan tinggi kepomongprajaan yang dapat menunjang tata kelola pemerintahan kita yang berkelas dunia. "Semoga IPDN dapat terdepan dalam inovasi, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme kepomongprajaan yang modern dan berdaya saing unggul dengan berlandaskan semangat kebangsaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara", tuturnya.



Selain Presiden, Ketua DPR RI dan MPR RI, sejumlah ucapan selamat dies natalis untuk IPDN juga diberikan oleh jajaran Menteri Kabinet seperti Menkopolkum, Mendagri, Menaker, Mendikbud dan Menparekraft RI serta pejabat dan pimpinan pemerintahan lainnya. Sebagai sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian berharap IPDN dapat mempertajam visinya sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang mencetak putra-putri bangsa kader aparatur sipil negara calon pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi, integritas yang tinggi, profesional, berjiwa melayani, berwawasan global, inovatif, produktif dan kompetitif. "Praja IPDN memiliki kemampuan memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang. Untuk itu



literasi digital dan literasi data merupakan hal yang wajib dikuasai oleh seluruh praja IPDN agar dapat memperkuat pemerintahan pusat maupun daerah serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan government yang lebih efektif dan efisien berkelas dunia", ujar Tito.

Sedangkan Wakil Mendagri, John Wempi Wetipo yang hadir secara langsung pada acara puncak dies natalis IPDN, kembali mengingatkan IPDN tentang tujuan awal didirikannya sekolah pamongpraja, "Sesuai dengan pesan Ir. Soekarno pada saat meresmikan APDN tahun 1956, bahwa pendirian sekolah pamongpraja sangat penting dan dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan khususnya penyelenggaraan pemerintahan. Berdirinya APDN hendaknya merupakan suatu pusat investment of humas skills dan mental investment serta pentingnya managerial skill dan efisiensi administrasi didalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pesan tersebut menjadi harapan dan doa hingga saat ini IPDN telah berkembang mengikuti zaman dan tuntutan global dengan sangat baik", tuturnya. Di usia yang sangat matang ini, John Wempi berharap IPDN dapat terus eksis dan mampu memberikan kontribusi nyata demi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah serta selalu menjadi perekat persatuan dan kesatuan NKRI. "Saya yakin seluruh praja IPDN dapat memiliki value, kecerdasan, kedisiplinan, berkepribadian yang humanis dan menguasai teknologi sehingga terbentuk jati diri yang unggul, berkualitas, berintegritas dan siap serta bangga mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara", ujarinya.

Di hari puncak perayaan dies natalis IPDN ini, Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M menyampaikan orasi ilmiahnya terkait "Strategi Pengelolaan pendidikan tinggi kepomongprajaan dalam mewujudkan kader pamong praja yang professional dan berkelas dunia", dalam orasinya Hadi memaparkan bahwa proses globalisasi saat ini terjadi semakin pesat dan masif, terutama sejak era digital atau era industri 4.0 dengan ditandai munculnya era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) yang memerlukan strategi baru baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. "Globalisasi akan membuat negara-negara semakin terkoneksi, namun yang terdampak globalisasi bukan hanya manusia dan informasi tetapi juga berpengaruh terhadap isu dan permasalahan. Selain globalisasi, ada beberapa tantangan dalam negeri yang dipengaruhi oleh dinamika global, oleh sebab itu memasuki era digital atau era industri 4.0 tata kelola pemerintahan perlu ditransformasi. Transformasi dilakukan pada aspek kebijakan, sumber daya manusia dan proses bisnis", ujarinya.

Menurutnya transformasi tata kelola pemerintahan dapat mengadopsi paradigma (dynamic governance) melalui kebijakan dengan melakukan transformasi pola pengaturan menjadi lebih fleksibel, delegasi untuk memperpendek rantai pengambilan keputusan, think ahead, think across dan think again. Aspek lain yang perlu bertransformasi yakni sumber daya manusia yakni mampu mengidentifikasi masalah

dengan cermat, mampu berkolaborasi, menguasai teknologi informasi dan memiliki integritas sebagai soft skill menghadapi tantangan global dan nasional. “Aspek terakhir yang perlu dilakukan transformasi ialah proses bisnis yang agile, maksudnya adalah proses bisnis yang dinamis, fleksibel, organisasi yang lebih mobile dan interoperabilitas”, ujar Hadi. Dalam menghadapi tantangan global ini beberapa transformasi di ranah pendidikan tinggi kepomongprajaan yang telah dilakukan IPDN yakni penataan kurikulum, digitalisasi proses bisnis melalui smart campus, optimalisasi laboratorium program studi untuk mendukung proses pembelajaran, persiapan pendidikan luar negeri melalui pelatihan persiapan beasiswa LPDP, penguatan penelitian, transparansi sistem rekrutmen calon praja dan pemenuhan standar pendidikan tinggi. “Dengan adanya transformasi ini, saya berharap IPDN dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dalam lingkungan yang kompleks dan unpredictable, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat, mempertimbangkan peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dengan prinsip, 3 T (think ahead, think across and think again) serta memiliki entrepreneur”, ujar Hadi.

## Arahan Presiden Jokowi pada Acara Dies Natalis ke-67 IPDN

Jatinangor (17/03/2023) Genap berusia 67 tahun, IPDN diharapkan dapat menjadi pilar kemajuan bangsa yang selalu berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden RI Ir. Joko Widodo pada saat menyampaikan ucapan selamat atas dies natalis IPDN ke-67. Dalam pesannya Bapak Presiden berharap IPDN mampu beradaptasi menguasai ilmu, teknologi terbaru, memiliki kompetensi dan keahlian baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. “IPDN sebagai kampus pencetak pamong praja unggul tidak boleh tertinggal, harus bergerak cepat menyiapkan SDM yang kreatif dan inovatif, yang menguasai keahlian masa depan dan siap bekerja dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia”, tuturnya. Selain Presiden RI, Ketua DPR RI dan MPR RI juga turut mengucapkan selamat atas dies natalis IPDN. Menurut Puan Maharani, IPDN memiliki tanggung jawab besar dalam menjadi tempat lahirnya pamong praja yang berkualitas, berdedikasi tinggi untuk menjadi pelayan rakyat. Untuk itu IPDN harus senantiasa meningkatkan kualitas para lulusannya. Sedangkan Ketua MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A menyampaikan bahwa Ia yakin IPDN terus berproses menjadi perguruan tinggi kepomongprajaan yang dapat menunjang tata kelola pemerintahan kita yang berkelas dunia. “Semoga IPDN dapat terdepan dalam inovasi, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme kepomongprajaan yang modern dan berdaya saing unggul dengan berlandaskan semangat kebangsaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara”, tuturnya.



Selain Presiden, Ketua DPR RI dan MPR RI, sejumlah ucapan selamat dies natalis untuk IPDN juga diberikan oleh jajaran Menteri Kabinet seperti Menkopolkam, Mendagri, Menaker, Mendikbud dan Menparekraft RI serta pejabat dan pimpinan pemerintahan lainnya. Sebagai sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian berharap IPDN dapat mempertajam visinya sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang mencetak putra-putri bangsa kader aparatur sipil negara calon pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi, integritas yang tinggi, professional, berjiwa melayani, berwawasan global, inovatif, produktif dan kompetitif. “Prajaja IPDN memiliki kemampuan memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi yang semakin berkembang. Untuk itu literasi digital dan literasi data merupakan hal yang wajib dikuasai oleh seluruh praja IPDN agar dapat memperkuat pemerintahan pusat maupun daerah serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan government yang lebih efektif dan efisien berkelas dunia”, ujar Tito.

Sedangkan Wakil Mendagri, John Wempi Wetipo yang hadir secara langsung pada acara puncak dies natalis IPDN, kembali mengingatkan IPDN tentang tujuan awal didirikannya sekolah pamongpraja, “Sesuai dengan pesan Ir. Soekarno pada saat meresmikan APDN tahun 1956, bahwa pendirian sekolah pamongpraja sangat penting dan dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan khususnya penyelenggaraan pemerintahan. Berdirinya APDN hendaknya merupakan suatu pusat investment of humas skills dan mental investment serta pentingnya managerial skill dan efisiensi administrasi didalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pesan tersebut menjadi harapan dan doa hingga saat ini IPDN telah berkembang mengikuti zaman dan tuntutan global dengan sangat baik”, tuturnya. Di usia yang sangat matang ini, John Wempi berharap IPDN dapat terus eksis dan mampu memberikan kontribusi nyata demi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah serta selalu menjadi perekat persatuan dan kesatuan NKRI. “Saya yakin seluruh praja IPDN dapat memiliki value, kecerdasan, kedisiplinan, berkepribadian yang humanis dan menguasai teknologi sehingga terbentuk jati diri yang unggul, berkualitas, berintegritas dan siap serta bangga mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara”, ujarnya.

Di hari puncak perayaan dies natalis IPDN ini, Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M menyampaikan orasi ilmiahnya terkait “Strategi Pengelolaan pendidikan tinggi kepomongprajaan dalam mewujudkan kader pamong praja yang professional dan berkelas dunia”, dalam orasinya Hadi memaparkan bahwa proses globalisasi saat ini terjadi semakin pesat dan masif, terutama sejak era digital atau era industri 4.0 dengan ditandai munculnya era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) yang memerlukan strategi baru baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. “Globalisasi akan membuat negara-negara semakin terkoneksi, namun yang terdampak globalisasi bukan hanya manusia dan informasi tetapi juga berpengaruh terhadap isu dan permasalahan. Selain globalisasi, ada beberapa tantangan dalam negeri yang dipengaruhi oleh dinamika global, oleh sebab itu memasuki era digital atau era industri 4.0 tata kelola pemerintahan perlu ditransformasi. Transformasi dilakukan pada aspek kebijakan, sumber daya manusia dan proses bisnis”, ujarnya.

Menurutnya transformasi tata kelola pemerintahan dapat mengadopsi paradigma (dynamic governance) melalui kebijakan dengan melakukan transformasi pola pengaturan menjadi lebih fleksibel, delegasi untuk memperpendek rantai pengambilan keputusan, think ahead, think across dan think again. Aspek lain yang perlu bertransformasi yakni sumber daya manusia yakni mampu mengidentifikasi masalah

dengan cermat, mampu berkolaborasi, menguasai teknologi informasi dan memiliki integritas sebagai soft skill menghadapi tantangan global dan nasional. “Aspek terakhir yang perlu dilakukan transformasi ialah proses bisnis yang agile, maksudnya adalah proses bisnis yang dinamis, fleksibel, organisasi yang lebih mobile dan interoperabilitas”, ujar Hadi. Dalam menghadapi tantangan global ini beberapa transformasi di ranah pendidikan tinggi kepamongprajaan yang telah dilakukan IPDN yakni penataan kurikulum, digitalisasi proses bisnis melalui smart campus, optimalisasi laboratorium program studi untuk mendukung proses pembelajaran, persiapan pendidikan luar negeri melalui pelatihan persiapan beasiswa LPDP, penguatan penelitian, transparansi sistem rekrutmen calon praja dan pemenuhan standar pendidikan tinggi. “Dengan adanya transformasi ini, saya berharap IPDN dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dalam lingkungan yang kompleks dan unpredictable, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat, mempertimbangkan peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dengan prinsip, 3 T (think ahead, think across and think again) serta memiliki entrepreneur”, ujar Hadi.

## STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAN DALAM MEWUJUDKAN KADER PAMONG PRAJA YANG PROFESIONAL DAN BERKELAS DUNIA



Saat ini dunia telah memasuki era digital yang dihasilkan dari penemuan dan inovasi yang sangat cepat dan radikal dalam bidang teknologi informasi pada dekade terakhir ini. Era digital ditandai dengan *Mobile Internet*, *Cloud computing*, *Internet of Things (IoT)*, *Big Data Analytics*, dan *Artificial Intelligence (AI)*. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan disrupsi yang sangat deras dan tidak hanya melanda dunia bisnis, namun juga menerpa pemerintahan. Dalam dunia bisnis banyak perusahaan besar konvensional harus gulung tikar karena lahirnya usaha kecil berbasis internet. Sementara dalam pemerintahan telah lahir *crypto currency* sebagai mata uang global dengan mata uang terbesarnya *bit coin*. Kehadiran *crypto currency* telah menimbulkan kegelisahan dan kegamangan pemerintahan negara diseluruh dunia dalam meresponnya. Jika mata uang *crypto* diterima dan digunakan secara massif, maka selain dapat mengganggu mata uang konvensional dunia, juga akan menimbulkan kecemasan di setiap negara dalam pengendalian perekonomian nasional dikala menghadapi krisis. Era digital juga semakin memperkuat globalisasi. Dengan digitalisasi, informasi dan transaksi tidak lagi dapat dibatasi oleh batas-batas negara. Kejadian dan perkembangan di suatu negara bahkan di suatu desa dapat diakses oleh seluruh dunia.

Seiring dengan perkembangan era revolusi industri yang telah memasuki revolusi Industri 4.0 tersebut, maka sudah seharusnya juga diikuti dengan perkembangan peradaban manusia yang sudah memasuki *Society 5.0*. Konsep *Society* pertama kali dikembangkan di Jepang yang bertujuan untuk menangani cepatnya perkembangan teknologi sebagai dampak Revolusi Industri 4.0. Bisa dikatakan *Society 5.0* menitik beratkan pada kehidupan cepat, dan terintegrasi dengan teknologi serta membuat kehidupan manusia menjadi efektif dan efisien.

Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* membawa perubahan yang mendasar dan radikal dalam berbagai segi kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam dunia pemerintahan. Dunia pemerintahan tidak bisa menghindarkan diri dari perubahan era digital saat ini hanya dengan bersandar pada otoritas absolut. Pemerintahan adalah cerminan realitas dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat, maka perubahan realitas dan nilai-nilai di era digital saat ini juga memaksa pemerintah untuk melakukan adaptasi diri sesuai dengan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat saat ini. Perubahan yang terjadi di era digital ini tentunya berimbas pula pada tantangan yang dihadapi seluruh negara di dunia.

Menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mendasar, serta dihadapkan pada tantangan global maupun tantangan nasional yang dinamis dan memerlukan pemecahan yang tepat dan cepat, maka tata kelola pemerintahan harus menyesuaikan dan bertransformasi agar siap menghadapi seluruh perubahan dan tantangan yang terjadi di masa depan. Salah satu transformasi tata kelola pemerintahan dapat mengadopsi paradigma pemerintahan dinamis (*dynamic governance*). Konsep ini telah membawa Singapura menjadi negara dengan pendapatan tertinggi di kawasan Asia (IMF, 2020).



Konsep *dynamic governance* ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan transformasi pemerintahan di Indonesia dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi tata kelola pemerintahan saat ini. Transformasi tata kelola pemerintahan yang perlu dilakukan meliputi: **Kebijakan**, kebijakan pemerintah harus adaptif, sehingga mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan sering sekali terjadi berubah tidak menentu. Kebijakan yang tidak adaptif sering gagap merespon kondisi

yang berubah tiba-tiba. Kegagapan pemerintah antara lain terlihat ketika merespon hadirnya angkutan online dengan kehadiran Gojek dan Grab pada tahun 2015. Pemerintah berada kebingungan merespon konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Transformasi tata kelola kebijakan yang adaptif dapat dilakukan melalui: **pertama**, mentransformasi pola pengaturan fungsi manajemen dari bentuk peraturan berupa perundang-undangan menjadi manual, direktif, formulir, dan bentuk lainnya sehingga dapat diubah dengan cepat ketika terjadi perubahan. Salah satu penyebab terjadinya pengelolaan pemerintahan yang lambat, kaku dan tidak responsif adalah paham serba peraturan. Paham ini telah menjadikan Indonesia sebagai rimba peraturan perundang-undangan. Instruksi Presiden Jokowi untuk mengurangi regulasi belum menunjukan hasil yang signifikan, hal ini disebabkan oleh paham serba peraturan yang masih bercokol kuat dalam pemikiran (*mindset*) penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Kedepan, seluruh dokumen pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan yang hanya bersifat arahan, pedoman dan sasaran yang mengikat internal pemerintah cukup dituangkan dalam bentuk modul, pedoman, instruksi atau bentuk lainnya untuk memberikan fleksibilitas dalam merespon perubahan lingkungan strategis. **Kedua**, delegasi, dalam era yang serba cepat dan masa depan yang sulit diprediksi, maka delegasi akan memperpendek rantai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tidak strategis harus didelegasikan kepada unit-unit pemerintahan terdepan sebagai strategi untuk mempercepat respon pemerintah.



**Ketiga**, berpikir kedepan (*think ahead*). Kebijakan yang adaptif harus disusun berdasarkan analisis terhadap perkembangan yang terjadi dimasa depan, namun pada era VUCA, dimana masa depan sulit diprediksi, maka jangkauan kebijakan tidak dirumuskan dalam jangka waktu yang Panjang. Model perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah perlu dikaji ulang, karena perubahan lingkungan strategis saat ini tidak terjadi secara linear dan tidak dipegaruhi oleh faktor yang ajeg dan tunggal. Analisis terhadap masa depan tidak lagi menggunakan data *time series* dengan teknik interpolasi atau ekstrapolasi berdasarkan asumsi perubahan terjadi secara linier. Analisis terhadap masa depan dilakukan dengan pendekatan multi data dan multi teknik analisis atau *multiple kritis* (Dunn, 2013). **Keempat**, berpikir lintas pelaku (*think across*). Masalah yang dihadapi atau tujuan yang ingin dicapai tidak jarang telah dialami dan dilakukan oleh negara atau pemerintah lain. Perumusan kebijakan dalam menyelesaikan masalah dapat

pula dilakukan dengan menyesuaikan praktek negara atau pemerintah lain yang telah lebih dulu berhasil mengatasi masalah yang sama atau mencapai tujuan yang sama. *Lesson learned* dari negara lain baik yang berhasil maupun yang gagal dalam mengatasi masalah yang sama dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi masalah yang sama atau mencapai tujuan yang sama. **Kelima**, kecermatan (*think again*). Kebijakan adaptif harus dirumuskan secara hati-hati dan cermat. Simulasi demi simulasi perlu dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan untuk menguji operabilitas dan efektifitas kebijakan. Penetapan kebijakan secara gegabah dan tanpa dilakukan simulasi yang cermat dapat menyebabkan kebijakan tidak bisa dijalankan atau tidak efektif saat diterapkan. **Sumber Daya Manusia**, sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi, di Era VUCA dengan tantangan global dan nasional yang dinamis dan strategis, menghendaki aparatur pemerintah yang mampu beradaptasi tidak hanya dengan lingkungan, melainkan juga dengan pekerjaan yang menuntut teknik dan metode yang terus berkembang. Sumber daya manusia yang diperlukan memiliki kemampuan: **Pertama**, pemecahan masalah (*problem solving*), kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dengan cermat, menstrukturkan masalah secara baik, dan merumuskan alternatif pemecahan masalah yang tepat merupakan kemampuan yang mutlak dan mendasar. Kemampuan pemecahan masalah tidak didapat secara alamiah, melainkan melalui proses belajar yang terstruktur dengan berbagai pendekatan. Setiap aparatur pemerintah harus mempunyai kemampuan memecahkan masalah dengan baik. **Kedua**, kemampuan kolaborasi, kompleksitas memerlukan kolaborasi, unit-unit kerja pemerintah tidak dapat lagi berkerja secara sendiri-sendiri, Egoisme sektoral yang menghambat terjadinya kolaborasi harus dikikis, karena hal tersebut akan membatasi pemerintah dalam mengatasi setiap masalah dan memperlambat dalam proses pelayanan. Kolaborasi tidak hanya antar unit kerja dalam satu kementerian/Lembaga, namun juga harus dilakukan antar kementerian/Lembaga. Semua rangkaian pengambilan keputusan dan pelayanan yang saling berkait tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri, melainkan oleh tim secara kolaboratif. **Ketiga**, menguasai IT, pemanfaatan IT sudah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka aparatur pemerintah pada bidang apapun harus mampu menguasai teknologi informasi. Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik dimasa depan akan digerakkan oleh IT. **Keempat**, integritas. Integritas merupakan *soft skill* yang harus dimiliki oleh ASN dalam menghadapi tantangan global dan nasional. Proses Bisnis, Proses bisnis harus lincah (*agile*). Menghadapi era VUCA dan tantangan global, proses bisnis harus lincah yang mengandung makna: **Pertama**, Dinamis dan Fleksibel. Proses bisnis tidak hanya memuat satu cara untuk satu pekerjaan, melainkan memberikan beberapa alternatif sesuai dengan kebutuhan pelanggan/warga masyarakat. Setaip warga negara dengan kondisi yang berbeda dapat dilayani dengan cara yang berbeda pula. Begitu pula dengan pelaksanaan pekerjaan, tidak hanya dilakukan melalui satu prosedur, melainkan beberapa prosedur sesuai dengan kondisi pekerjaan maupun kondisi dari pelaksana pekerjaan tersebut. **Kedua**, Organisasi lincah, proses bisnis yang lincah harus didukung oleh model stuktur organisasi yang lincah pula. Organisasi yang lincah bermakna bahwa struktur yang terbentuk tidak membatasi adanya kebutuhan tugas baru yang harus dilaksanakan. Struktur lincah tidaklah bermakna adanya perubahan struktur organisasi setiap adanya tugas baru, namun struktur organisasi lincah bermakna bahwa struktur organisasi harus dapat diberikan tugas sesuai dengan tuntutan kinerja yang harus dicapai oleh organisasi. **Ketiga**, interoperabilitas. Proses bisnis harus mampu dioperasikan dengan mengintegrasikan berbagai proses

bisnis yang berada pada satu rangkaian proses. Pekerjaan atau pelayanan publik yang memerlukan data dari instansi yang lain tidak perlu lagi harus menyediakan data tersebut secara sendiri-sendiri pada setiap pelayanan. Data pada satu instansi dapat diakses oleh instansi yang lain dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pelayanan publik. Interoperabilitas tidak hanya dalam satu kementerian/Lembaga namun harus bisa dilakukan antar kementerian/Lembaga. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan satu data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan interoperabilitas proses bisnis antar kementerian/lembaga di masa depan.

Sejalan dengan konsep *Dynamic Governance* yang bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh institusi pemerintahan di masa mendatang agar bisa bersaing secara global, Chinn et.al (2015) mengemukakan perlunya paling tidak 5 (lima) pendekatan menuju *World Class Government (WCG)* atau pemerintahan kelas dunia, yaitu:

1. Mendesain ulang pelayanan publik secara radikal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan;
2. Restrukturisasi pendekatan pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik, meliputi penganggaran, investasi dan pendapatan, serta manajemen modal kerja;
3. Memperkuat kepemimpinan fungsional dan kemampuan di seluruh jenjang pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan struktur, skala, dan model operasional pemerintah; serta
5. Mengembangkan visi, akuntabilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk menggerakkan skala besar transformasi.

Pendidikan tinggi termasuk Pendidikan tinggi kepomongprajaan wajib menyiapkan peserta didiknya untuk mampu menghaapi tantangan global dan nasional yang diwarnai dengan era digital atau era industri 4.0. Untuk menjawab tantangan tersebut, IPDN telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kebijakan dan program yang meliputi: **Pertama**, penataan kurikulum, kurikulum merupakan serangkaian atau satu set pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik selama mengikuti Pendidikan. IPDN pada tahun 2021 telah melakukan penataan kurikulum dengan memasukkan beberapa mata kuliah yang mendukung kemampuan Praja IPDN untuk bekerja dalam era digital. Beberapa mata kuliah yang diperkuat seperti kemampuan Bahasa Inggris, kemampuan IT, kemampuan kolaborasi, kemampuan pemecahan masalah dan peningkatan frekuensi serta volume praktikum baik kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler. **Kedua**, digitalisasi proses bisnis melalui *smart campus*, dimana proses pembelajaran dan kegiatan administrasi IPDN dilakukan secara digital menggunakan beberapa aplikasi yang terintegrasi. **Ketiga**, Ketersediaan dan optimalisasi laboratorium program studi untuk mendukung proses pembelajaran sebagai implementasi Pendidikan terapan serta pelaksanaan Praktek Lapangan/Magang untuk memperkuat keahlian praja terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan secara nyata di instansi pemerintah.

**Keempat**, Persiapan Pendidikan Luar Negeri, untuk mempersiapkan kader yang berwawasan global, IPDN menyelenggarakan program non kurikuler berupa pelatihan persiapan memperoleh beasiswa Pendidikan di perguruan tinggi di luar negeri yang dibiayai dari LPDP. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2020. **Kelima**, penguatan penelitian. Untuk mendukung perguruan tinggi sebagai laboratorium

penemuan (*invention laboratory*), IPDN telah memperbesar anggaran penelitian dan pengabdian, Kebijakan ini bertujuan agar IPDN dapat memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sekaligus memberikan sumbangan kepada para pihak dalam mengatasi masalah praktis, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini selaras dengan PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi Kementerian/Lembaga yang mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi Kementerian/Lembaga dibentuk untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi kewenangan kementerian yang bersangkutan. Prioritas pembangunan nasional yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam negeri mencakup politik dalam negeri, desentralisasi dan otonomi daerah, pembinaan kewilayahan dan pembangunan daerah, pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan desa, dan penguatan tata kelola dan kelembagaan. **Keenam**, Transparansi Sistem Rekrutmen Calon Praja, untuk memperoleh calon praaja yang berkualitas, IPDN telah menetapkan standar calon praaja yang lebih tinggi disertai dengan proses seleksi yang ketat dan transparan. Rekrutmen praaja IPDN dilakukan melakukan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini selain untuk efisiensi proses seleksi, juga bertujuan untuk mewujudkan adanya saling kontrol antar pihak untuk mencegah terjadi penyimpangan. Rekrutmen Praja IPDN melibatkan Menpan dan RB, BKN dan Mabes Polri. Pelaksanaan seleksi penerimaan praaja IPDN dilakukan melalui tes kompetensi dasar menggunakan CAT oleh BKN yang bersifat *real time*. Seleksi Kesehatan, kesamaptaan dan psikologi dilakukan oleh Mabes Polri yang hasil setiap tahapnya dilakukan sesaat setelah dilaksanakan tes, dan nilai setiap peserta diumumkan pada saat itu juga. Peserta tes ikut menandatangani lembar nilai yang diperolehnya. **Ketujuh**, Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan, IPDN terus berbenah dengan memenuhi seluruh standar baik yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, maupun standar tambahan yang ditetapkan oleh IPDN. Dalam rangka memenuhi standar Pendidikan IPDN, seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Pendidikan IPDN.



Melalui berbagai upaya tersebut, IPDN diharapkan akan menghasilkan lulusan yang siap kerja dalam lingkungan yang kompleks dan *unpredictable*. Saat menjadi pemimpin, mereka akan terus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, terus belajar, dan menjalin kolaborasi yang luas. Cara-cara penyelesaian masalah yang mereka lakukan tidak hanya mengandalkan pembelajaran dari masa lalu, tetapi juga dengan kemampuan penalaran yang kuat untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa baru yang terus terjadi dengan prinsip berpikir kedepan (*think ahead*), berpikir lintas pelaku (*think across*), dan kecermatan (*think again*).

memiliki *basic* kecamongprajaan dengan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kami menghadirkan para pelaksana dan pembuat kebijakan sehingga praja akan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan publik di daerah.” ujarnya. Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku serta Kota Bukittinggi merupakan contoh daerah yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik. Sebagai contoh, saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,01% dengan tingkat kemiskinan 6,73% dan tingkat pengangguran terbuka 4,86%. Meskipun saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8% namun dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri. Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, maka diharapkan kasus stunting dapat berkurang. Dalam pemaparannya, H. Sutarmidji, SH menyampaikan pesan bagi Praja IPDN untuk tidak melakukan manipulasi data karena data mengenai suatu daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tidak hanya itu, H. Sutarmidji, SH juga berpesan kepada Praja yang hadir secara luring maupun daring mengenai empat hal untuk mencapai kesuksesan yaitu kejujuran, disiplin, dukungan orang terdekat dan skill atau kompetensi.



Berbeda dengan Kalimantan Barat, Provinsi Maluku memiliki permasalahan dan strategi penyelesaian masalah yang cukup unik. Meskipun secara geografis Maluku hanya memiliki kurang dari 5% wilayah darat, Pemerintah Provinsi Maluku mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi yaitu sebesar 5,73%. “Dua strategi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengatasi berbagai masalah publik dengan sumber daya yang terbatas yaitu dengan melakukan sinergitas baik dengan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota dan mengalokasikan dana di sektor basis dan non basis.” Ujar Dr. Anton A. Lailossa, S.T., M.Si. Pemerintah Provinsi Maluku juga memaksimalkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk melakukan ekspor rempah, hasil perikanan dan memaksimalkan sektor pariwisata. Kota Bukittinggi pun memiliki kebijakan tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi. “Kami membuat kebijakan Tabungan Utsman, yaitu program pinjaman bagi para pelaku UMKM tanpa bunga dan tanpa agunan. Hal ini terbukti mampu memberikan stimulus bagi mereka (pelaku UMKM) sehingga ekonomi tetap terjaga” tutur Erman. Walikota Bukittinggi terbilang sukses dalam menghadapi permasalahan stunting dengan turunnya angka stunting secara signifikan yang sebelumnya pada tahun 2021 mencapai 19% menjadi 16,8% pada tahun 2022. Pelaksanaan diskusi berjalan dinamis, Praja antusias memberikan berbagai pertanyaan terutama berkaitan dengan strategi pengambilan kebijakan dalam menghadapi stunting dan permasalahan ekonomi seperti inflasi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Rangkaian kegiatan Dies Natalis IPDN dilanjutkan dengan acara Khitanan Massal Gratis yang dilaksanakan di Poliklinik IPDN dengan jumlah peserta sebanyak 51 orang. Kegiatan khitanan massal ini diperuntukkan bagi masyarakat di Kecamatan Jatinangor dan sekitarnya. Sejumlah dokter dan paramedis dari IPDN bekerjasama dengan Rumah Sakit Tentara Jajaran KESDAM III Siliwangi ditugaskan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Rektor IPDN, Dr. Hadi Prabowo, M.M. pun meninjau langsung kegiatan tersebut dan memberikan perhatian bagi anak-anak yang hadir. Peserta Khitanan Massal Gratis juga menerima santunan, tas sekolah, sarung, ikat pinggang, snack dan makan siang. Kegiatan khitanan massal merupakan suatu bentuk pengabdian dan tanggungjawab sosial Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat.

## Pemilu Tetap Dilaksanakan Tahun 2024 !!!



Jatinangor (14/03/2023). Pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024, hal ini disampaikan Ketua KPU pada saat menjadi narasumber kegiatan seminar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Atensi tinggi IPDN terhadap penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 terlihat dengan diadakannya kegiatan Seminar Nasional dengan mengusung topik “Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat”. Gelaran seminar nasional ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan IPDN dalam memperingati Dies Natalis ke-67 IPDN yang akan diperingati pada tanggal 17 Maret 2023 mendatang. Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M mengatakan bahwa penyelenggaraan seminar nasional dengan mengangkat hot topic yakni terkait pemilu ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemilu, karena menurutnya keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu saja tapi juga harus mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media masa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. “Kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan. Oleh karena itulah saya mengundang narasumber yang kompeten untuk dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu kepada seluruh civitas akademika dan praja IPDN pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya yang menyaksikan kegiatan ini secara daring”, ujar Hadi.

Selain narasumber yang hadir yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.d), Ketua Bawaslu RI yang diwakilkan oleh anggota Bawaslu kordiv SDMO dan Diklat ( Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H), Ketua Dewan



Salah satu kuncinya keberhasilan Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan adalah kemampuan entrepreneur/ kewirausahaan sehingga mampu dan peka dalam merespon dinamika perubahan baik secara nasional, regional maupun global agar memiliki daya saing yang tinggi, serta berani mengambil resiko secara rasional.

Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M



## Mari Mengenal Visi, Misi dan Tujuan dari Sekolah Pencetak Motor Penggerak Bangsa

Visi IPDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor IPDN no. 5 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020-2045 dan Peraturan rektor IPDN no. 11 tahun 2020 tentang Rencana Strategis IPDN Tahun 2020-2024 yaitu **“Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, Berdaya Saing pada Tahun 2045”**.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan keamongprajaan dengan mengembangkan, membina dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal;
3. Mengembangkan pendidikan keamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah daerah serta kemajuan masyarakat;
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.



Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan pamong praja yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berkepribadian Pancasila, memiliki keunggulan, profesional dan berintegritas;
2. Menghasilkan lulusan pamong praja yang dapat mengembangkan, memberdayakan dan menerapkan ilmu terapan kepmongprajaan di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menghasilkan pembentukan lulusan kader pemerintahan dalam negeri sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di IPDN yang memenuhi delapan pedoman pembinaan kader pamong praja (Astha Brata).



**ASTHA BRATA IPDN**

1. Berjiwa Pancasila
2. Unggul, profesional dan berintegritas
3. Menguasai IPTEK dan berdaya saing
4. Kader revolusi mental dan agen perubahan
5. Mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat
6. Perikat persatuan dan kesatuan NKRI
7. Berwawasan nasional dan global
8. Adaptif, inovatif, produktif dan kompetitif

## IPDN Mengangkat Tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Penanganan Stunting” dalam Gelaran Stadium General Jelang Dies Natalis ke-67

Jatinangor, Rabu (08/03/2023) Institut Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Stadium General secara daring dan luring dengan mengundang Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku serta Walikota Bukittinggi. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dies natalis IPDN ke-67 yang akan digelar pada 17 Maret 2023. Rektor IPDN, Dr. Hadi Prabowo, M.M. bersama H. Sutarmidji, SH, M.Hum., Dr. Anton A. Lailossa, S.T., M.Si serta H. Erman Safar, SH berbicara mengenai Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah khususnya dalam hal Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Penanganan Stunting serta masalah daerah lainnya. Stadium general ini dilaksanakan secara luring di Kampus IPDN Jatiningor dan diikuti secara daring oleh praja di seluruh kampus daerah.

Rektor IPDN mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran didalam penerapan teori dan praktek kepada Praja. “Seorang Praja dituntut mampu

Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI (Heddy Lugito), Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Dr. Drs. Bahtiar, M.Si), Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Titi Anggraini, S.H., M.H) dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia (Hanta Yudha, A.R), kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekjen KPU (Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si), Sekretaris DKPP, Sekjen Partai Politik, Ketua KPU dan Bawaslu dari provinsi Jabar, DKI dan Banten juga beberapa tamu undangan lainnya.



Hadi meyakini bahwa pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Oleh karena itu menurutnya, masyarakat Indonesia harus benar-benar mengawal supremasi pelaksanaan pemilu 2024 agar tidak ada lagi ujaran kebencian, hoax, black campaign, intimidasi dan lain sebagainya yang akhirnya dapat membuat pemilu tahun 2024 terlaksana dengan lebih berkualitas, demokratis, jujur, adil dan bermartabat. “Dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU saat ini telah melaksanakan tahapan pertama yakni mendapat DP 4 pada tanggal 14 desember 2022 dari Kemendagri, dan hasilnya dinyatakan pemilih pemilu sebanyak 204.656.053 pemilih yang terdiri atas 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih Wanita”, tutur Hadi. Masih menurutnya, Hadi berharap dengan hadirnya KPU disini dapat memberikan informasi terkait peta tingkat kerawanan pemilu. Karena pada tahun 2019 tingkat kerawanan pemilu ada di Papua Barat 52,83% kemudian Jogja 52,14% dan Sumbar 51,21%.

Pemilu mempunyai dasar legalitas konstitusional yang kuat setelah berlakunya amendemen konstitusi, hal inilah yang menurut Ketua KPU RI menjadi dasar bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan atau tidak ditunda. “Sejak tanggal 12 sampai dengan 14 februari lalu merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, masyarakat dapat mengakses link [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, jika sudah terdaftar masyarakat dapat melihat lokasi TPS nya nanti. Untuk praja IPDN, KPU akan membantu praja IPDN untuk melakukan pemindahan pemilihan agar dapat mengikuti pemilu di kecamatan tempat mereka bersekolah dalam hal ini di Kampus IPDN berada tapi apabila terjadi lintas dapil maka mereka hanya bisa mengikuti pemilihan presiden”, ujarnya. Hasyim Asy’ari juga mengatakan bahwa peserta pemilu partai politik telah ditetapkan pada tanggal 14 desember 2022 yang lalu yakni sebanyak 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan 6 partai aceh. Sedangkan untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR, DPRD dan DPD belum dilaksanakan. “Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada bulan Oktober 2023 sedangkan pendaftaran

Pada kesempatan ini anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan bahwa tugas utama Bawaslu adalah memastikan apakah penyelenggaraan pemilu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu melakukan pengawasan pemilu dengan 2 model yakni pengawasan melekat (setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diupayakan ada jajaran bawaslu yang turut terlibat sehingga dapat melihat langsung fakta dilapangan) serta pengawasan partisipatif (pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat). “Beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi pada pemilu yakni dalam tahapan penyelenggaraan seperti pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi, untuk itulah Bawaslu bertugas melakukan pengawasan agar isu-isu potensi permasalahan ini dapat kita minimalisir”, ujarnya.

Heddy Lugito mengatakan bahwa pemilu 2024 itu sangat strategis, hal ini dikarenakan kita akan menghadapi hal yang baru dalam tata pemerintahan, “Presiden dan wakil presiden sudah pasti baru, bupati, gubernur juga sudah pasti baru. Hal ini juga akan mempengaruhi manajemen pemerintahan atau tata kelola yang berbeda, karena gaya kepemimpinan pun akan baru”, ujarnya. Ia juga menegaskan 5 syarat pemilu demokratis yakni regulasi yang jelas, penyelenggara yang mandiri, berintegritas dan kredibel, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif serta birokrasi yang netral.

Senada dengan ketua KPU, Dirjen. Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Bahtiar juga kembali menegaskan terkait penundaan pemilu, “Tidak ada pemikiran tunda pemilu. Secara konstitusi pemerintah tidak pernah berpikir akan menunda pemilu. Saya pastikan, kami akan melawan oknum-oknum yang melawan konsitusi”, ujarnya. Karena menurutnya, penyelenggaraan pemilu merupakan hasil kesepakatan pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu pada rapat kerja bersama Mendagri dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022. Hal sama juga disampaikan oleh Titi Anggraini selaku Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi “Pemilu wajib tepat waktu dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil juga harus bersifat nasional, tetap dan mandiri”, tuturnya. Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi saat pemilu 2019 sangat mungkin kembali terulang pada pemilu 2024, sehingga perlu adanya komitmen dan pengawalan maksimal oleh semua otoritas dan elemen bangsa. Sedangkan narasumber selanjutnya yakni Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia menyampaikan beberapa simpang siur informasi pelaksanaan pemilu ditunda itu terjadi karena ada beberapa elite politik dan elite pemerintah atau oknum yang masih memantik isu penundaan, warga sipil juga ada yang turut serta memantik isu tersebut. “Kita harus sepakat bahwa pelaksanaan pemilu 2024 akan berlangsung secara tepat waktu, berkualitas dan berintegritas. Berkualitas disini yakni luber, jurdil, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada pelanggaran berarti, biaya politik kampanye rendah serta teduh dan menggembiraka. Sedangkan berintegritas yakni adanya netralitas penyelenggara, netralitas pemerintah, netralitas pengawas, netralitas aparat keamanan, fairness partai dan kandidat serta fairness pemilih”, tuturnya. Berdasarkan hasil survey poltracking Indonesia pada bulan Januari 2023, sebanyak 71,9% masyarakat mengatakan siap untuk mencoblos, potensi partisipasi pemilih pada pemilu 2024 diprediksi akan tinggi. Begitupun dengan hasil survey terkait pengetahuan pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, sebanyak 53,4% menyatakan sudah mengetahui informasi terkait pemilu.

## Rektor IPDN Berharap Alumni IPDN Dapat Menempati Jabatan Strategis di Pemerintahan

Jatinangor (16/03/2023). Rektor IPDN, Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M berharap alumni IPDN dapat lebih maju dan berkembang agar dapat menempati jabatan strategis di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini disampaikan Hadi saat menghadiri kegiatan temu alumni IPDN dalam rangka rangkaian dies natalis ke-67 IPDN. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan alumni IPDN tiap angkatan dan tamu undangan lainnya. Hingga tahun 2023 ini, alumni IPDN yang mengabdikan sebagai abdi negara baik di pemerintah pusat maupun daerah telah mencapai 31.411 orang. "Tak sedikit dari para alumni ini yang kini telah menduduki jabatan penting di pemerintahan. Sampai tahun ini saja, alumni IPDN yang menjabat sebagai gubernur ada 2 orang, walikota 10 orang, bupati 26 orang dan masih banyak lagi" ujar Hadi. Hal ini membuktikan bahwa kredibilitas dan kompetensi alumni IPDN dapat bersaing di era globalisasi ini.

Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada alumni yang masih terus berkontribusi untuk kemajuan IPDN. "Saya berterima kasih kepada seluruh alumni yang telah memberikan kontribusi, sumbangsih dan berpartisipasi bagi IPDN. Partisipasi ini tentunya membanggakan kami karena itu berarti ikatan antara alumni dan IPDN tidak dapat dipisahkan karena masih ada kepedulian yang tinggi", tuturnya.



Pada kesempatan ini pula dihadapan para alumni dan tamu undangan, Rektor IPDN turut mensosialisasikan program pascasarjana dan program profesi keamongprajaan yang dimiliki IPDN. "IPDN tercatat sebagai salah satu sekolah yang telah meluluskan alumni S2 terbanyak. Hingga tahun 2023, program magister IPDN telah meluluskan 2.240 orang dan program doktor sebanyak 191 orang", ujar Prof. Wirman Syafri, M.Si selaku Direktur Sekolah Pascasarjana. "Semoga dengan adanya temu alumni ini, seluruh alumni disini dapat membantu mempromosikan kepada rekan-rekan sejawat didaerah terkait program profesi keamongprajaan. Jadi nanti kepala daerah dapat mengirimkan para ASN nya yang akan menjadi camat dan belum memiliki latar belakang ilmu pemerintahan untuk dapat mengikuti program profesi keamongprajaan di IPDN", tutur Hadi.

Rasa bangga juga disampaikan oleh salah satu alumni IPDN yang kini menjabat sebagai Sekjen Ombudsman RI, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP., M.S, "Dua puluh enam tahun saya meninggalkan kesatriaan ini, saya bangga dan takjub dengan perubahan IPDN 180°. IPDN sudah berkembang semakin pesat dan hebat. Satu yang ingin saya ingatkan kepada seluruh adik-adik praja untuk tetap memegang teguh jiwa korsa", ujar Suganda.

## MENGENAL LEBIH DEKAT LABORATORIUM BERBASIS PRAKTIK EMPIRIS PEMERINTAHAN DI FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN IPDN

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 mengamanatkan setiap kampus vokasi untuk memiliki laboratorium di setiap program studinya dalam rangka mendukung proses belajar mengajar. Fakultas Politik Pemerintahan (FPP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melaksanakan amanat tersebut dengan membentuk laboratorium di lingkungan prodi.

Laboratorium di Lingkungan Fakultas Politik Pemerintahan terdiri dari Center of Politics and Society, (CPS) sebagai Lab Prodi Politik Indonesia Terapan (PIT), Center of Forecasting Policy and Evaluation (CFPE) sebagai Lab Prodi Studi Kebijakan Publik (SKP), dan Economic Development and Empowerment Lab (EDE LAB) Sebagai Lab Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (PEPM).

### Profil Center of Politics and Society (CPS), Lab Prodi Politik Indonesia Terapan (PIT)

#### Visi:

Menjadi pusat kegiatan praktikum dan penelitian di bidang politik terapan yang inovatif dan produktif

#### Misi:

1. Menyelenggarakan praktikum yang menarik dan inovatif untuk mendukung pemahaman materi perkuliahan.
2. Melaksanakan penelitian, kompetisi, dan pelaksanaan tugas akhir di bidang politik terapan.
3. Melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan kerjasama peningkatan kualitas praktikum.

#### Maksud:

Meningkatkan kompetensi praja di bidang politik terapan yang inovatif dan produktif.

#### Tujuan:

1. Membekali kompetensi praja dalam menyusun Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan bidang politik dalam negeri.
2. Membekali kompetensi praja dalam menyelenggarakan sosialisasi tahapan pemilihan kepala desa kepada masyarakat.
3. Membekali kompetensi praja dalam melaksanakan manajemen konflik pemilihan kepala desa.
4. Membekali kompetensi praja dalam menumbuhkan kelompok masyarakat sadar politik.
5. Membekali kompetensi praja dalam menyusun naskah pidato bidang politik dalam negeri.

#### Peralatan Praktik:

##### Internal:

1. Komputer;
2. Dokumen panduan penyusunan TOR/KAK;
3. Alat peraga (pamphlet dll) sosialisasi peilkades;
4. Alat peraga manajemen konflik pilkades (mengatasi demo dan kondisi saat menjadi saksi di persidangan terkait gugatan hasil pilkades);
5. Dokumen panduan penyusunan dan evaluasi survey indeks demokrasi serta elektabilitas paslon.

**Eksternal:**

Dokumen proses bisnis dari Dirjen Otda, Dirjen Polpum, KPU, Bawaslu, KPUD, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pilkades serta di pengadilan saat menjadi saksi.

Lokus Praktik berada pada internal: di ruang CPS Prodi PIT di Gedung Perpustakaan lantai 4/5 dan eksternal: Dirjen Otda, Dirjen Polpum, KPU, Bawaslu, KPUD, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pengadilan. Petugas lab terdiri dari internal (pegawai unit lab FPP); eksternal (pegawai unit lab FPP dan pegawai instansi lokus eksternal) dan Pelatih lab terdiri dari Dosen dan Pelatih FPP dengan kompetensi sesuai kegiatan utama Lab.

Kegiatan utama pada Laboratorium Prodi Politik Indonesia Terapan adalah melakukan praktikum dan riset tentang:

**Internal :**

- Menyusun TOR atau KAK kegiatan bidang politik dalam negeri;
- menyelenggarakan sosialisasi tahapan pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
- melaksanakan manajemen konflik pemilihan kepala desa;
- menumbuhkan kelompok masyarakat sadar politik;
- Menyusun serta membacakan naskah pidato bidang politik dalam negeri;
- Menyusun dan melakukan survey Indeks Demokrasi;
- Menyusun dan melakukan survey elektabilitas pasangan calon.

**Eksternal:** mempelajari proses bisnis dari Dirjen Otda, Dirjen Polpum, KPU, Bawaslu, KPUD, Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pilkades.

**Center of Forecasting Policy and Evaluation (CFPE), Lab Prodi Studi Kebijakan Publik (SKP)****Visi:**

Menjadi Pusat Kegiatan Praktikum dan Penelitian di Bidang Kebijakan Pemerintahan yang Inovatif dan Produktif.

**Misi:**

- Menyelenggarakan praktikum yang menarik dan inovatif untuk mendukung pemahaman materi perkuliahan.
- Melaksanakan penelitian, kompetisi, dan pelaksanaan tugas akhir di bidang kebijakan pemerintahan.
- Melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan kerjasama peningkatan kualitas praktikum.

**Maksud:**

Meningkatkan kompetensi praja di bidang kebijakan pemerintahan yang inovatif dan produktif.

**Tujuan:**

- Membekali kompetensi praja dalam merumuskan masalah kebijakan .
- Membekali kompetensi praja dalam menyusun alternatif kebijakan .
- Membekali kompetensi praja dalam meramal masa depan kebijakan.
- Membekali kompetensi praja dalam menyusun rekomendasi kebijakan .
- Membekali kompetensi praja dalam menyusun kertas kebijakan.
- Membekali kompetensi praja dalam menyusun rencana kegiatan.
- Membekali kompetensi praja dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
- Membekali kompetensi praja dalam menghitung anggaran dan biaya kegiatan.

- Membekali kompetensi praja dalam memantau kebijakan.
- Membekali kompetensi praja dalam melaksanakan evaluasi kebijakan.

Lokus praktik lab ini terdiri dari Internal: di ruang CFPE Prodi SKP di Gedung Perpustakaan lantai 4/5 dan Eksternal: Seluruh eselon 1 di Kemendagri dan seluruh OPD di Pemerintah Daerah. Peralatan praktik lab menggunakan Internal: komputer, dokumen pendukung penyusunan kertas kebijakan, dokumen pendukung penyusunan policy brief dan naskah akademik. Eksternal: komputer, dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan

Kegiatan utama pada Laboratorium Prodi Studi Kebijakan Publik adalah melakukan praktikum dan riset tentang:

**Internal:**

- merumuskan masalah kebijakan;
- Menyusun alternatif kebijakan;
- meramal masa depan;
- Menyusun rekomendasi kebijakan;
- Menyusun kertas kebijakan (hasil formulasi kebijakan);
- Menyusun rencana kegiatan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- menghitung anggaran dan biaya kegiatan;
- memantau kebijakan;
- melaksanakan evaluasi kebijakan;
- Menyusun policy brief;
- Menyusun naskah akademik.

**Eksternal:** mempelajari proses bisnis kebijakan Seluruh eselon 1 di Kemendagri dan seluruh OPD di Pemerintah Daerah.

Pelatih internal praktikum terdiri dari Dosen/Pelatih dengan kompetensi sesuai dengan materi praktik laboratorium CFPE dan Dosen/Pelatih yang memiliki pengalaman merumuskan atau mengevaluasi kebijakan di lingkungan pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pelatih eksternal terdiri dari pihak yang berkaitan langsung dengan urusan kebijakan publik dan pakar/ahli kebijakan publik. Petugas laboratorium berupa staff unit laboratorium Fakultas Politik Pemerintahan

**Economic Development and Empowerment Laboratium (EDE LAB), Lab Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (PEPM)****Visi:**

Menjadi pusat kegiatan praktikum dan penelitian di bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan produktif.

**Misi:**

- Menyelenggarakan praktikum yang menarik dan inovatif untuk mendukung pemahaman materi perkuliahan;
- Melaksanakan penelitian, kompetisi, dan pelaksanaan tugas akhir di bidang politik pemerintahan;
- Melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan kerjasama peningkatan kualitas praktikum.

**Maksud:**

Meningkatkan kompetensi praja di bidang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan produktif.

**Tujuan:**

- Membekali kompetensi praja dalam mempresentasikan permasalahan dan memberikan usulan solusi.
- Membekali kompetensi praja dalam memimpin apel dan memberikan pengarahan.
- Membekali kompetensi praja dalam menyampaikan pidato Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan & Pemberdayaan.

4. Membekali kompetensi praja dalam memimpin dan menulis notulen rapat Musrenbang.
5. Membekali kompetensi praja dalam menulis naskah dinas.

Peralatan Praktik lab ini terdiri dari:

**Internal:**

1. Komputer;
2. Mimbar pidato;
3. Dokumen pelaksanaan musrenbang;
4. Dokumen peraturan tentang panduan pembuatan tata naskah dinas;
5. Dokumen panduan penyusunan dan evaluasi KHL, pertumbuhan ekonomi daerah, dan IPM

**Eksternal:**

Dokumen proses bisnis Dirjen Bangda, Dirjen Pemdes, Dirjen otda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Perekonomian, Dinas UMKM, BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan, serta Dinas Sosial.

Lokus praktik, petugas, dan pelatih lab adalah Internal: di ruang EDE LAB Prodi PEPM di Gedung Perpustakaan lantai 4/5. Eksternal: Dirjen Bangda, Dirjen Pemdes, Dirjen otda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Perekonomian, Dinas UMKM, BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan, serta Dinas Sosial. Petugas lab terdiri dari Internal (pegawai unit lab FPP); eksternal (pegawai unit lab FPP dan pegawai instansi lokus eksternal). Pelatih lab terdiri dari Dosen dan Pelatih FPP dengan kompetensi sesuai kegiatan utama Lab.

Kegiatan utama pada Laboratorium Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah melakukan praktikum dan riset tentang:

**Internal:**

1. Mempresentasikan permasalahan dan memberikan usulan solusi;
2. Memimpin apel dan memberikan pengarahannya;
3. Menyampaikan pidato Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan & Pemberdayaan;
4. Memimpin dan menulis notulen rapat Musrenbang;
5. Menulis naskah dinas;
6. Menyusun dan melaksanakan survey kebutuhan hidup layak (KHL);
7. Menyusun dan melakukan survey pertumbuhan ekonomi daerah;
8. Menyusun dan melakukan sosialisasi pemberdayaan kewirausahaan;
9. Menyusun dan melakukan survey indeks pembangunan manusia.

**Eksternal:** mempelajari proses bisnis Dirjen Bangda, Dirjen Pemdes, Dirjen otda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Perekonomian, Dinas UMKM, BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan, serta Dinas Sosial



# JELAJAH



## MENINGKATKAN KUALITAS SDM APARATUR SECARA SISTEMATIS MELALUI *REFRESHMENT* DAN SMART ASN DALAM UPAYA Mendukung Terwujudnya PEMERINTAHAN KELAS DUNIA

Oleh : **Teresa Irminda Nangameka, S.STP., M.Tr.I.P.**

"Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia" menjadi sebuah visi Reformasi Birokrasi yang ingin dicapai di tahun 2025 sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perjalanan panjang dari usaha mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar dapat menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025 akhirnya mencapai periode akhir. Pemerintah sedang berada pada periode penguatan lima tahun ketiga dengan fokus akhir target adalah tercapainya pemerintahan kelas dunia. Pemerintahan kelas dunia yang dimaksud adalah menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, dengan ciri pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ada 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan dengan adanya Reformasi Birokrasi menyeluruh; 1) Organisasi, adanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); 2) Tata Laksana, menghasilkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; 3) Sumber Daya Manusia Aparatur, mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; 4) Pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 5) Akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 6) Pelayanan Publik, tercapainya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 7) Pola pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur, menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Sementara itu, PermenpanRB No 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagai turunan dari Peraturan Presiden tersebut menjelaskan beberapa area perubahan pada *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, antara lain 1) Manajemen

Perubahan; 2) Deregulasi Kebijakan; 3) Penataan Organisasi; 4) Penataan Tata Laksana; 5) Penataan SDM Aparatur; 6) Penguatan Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi secara menyeluruh telah menghabiskan 13 tahun ketika pertama kali menjadi sebuah awal pergerakan besar di tahun 2010. Sejak adanya upaya perubahan dalam tata kelola pemerintahan, isu penataan sumber daya manusia aparatur selalu menjadi pemantik perdebatan panjang tentang bagaimana idealnya sebuah birokrasi. Dari sekian banyak area perubahan menurut Perpres 81 Tahun 2010 dan PermenpanRB No. 25 Tahun 2020, selalu saja ASN sebagai titik fokus masyarakat dalam menilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Masyarakat sebagai objek atau penerima manfaat dalam pelayanan publik selalu menyoroti kinerja ASN, tanpa mempertimbangkan bagaimana sebenarnya seorang pelaksana kebijakan di lapangan bisa jadi merupakan produk dari sebuah sistem. Sistem yang salah kah, atau manusia yang salah?

Terciptanya ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi adalah mimpi besar pemerintah dalam menata para pekerjanya. *Merit system* atau sistem merit menjadi alat pemerintah untuk memuluskan penataan ini. Upaya pertama yang dilakukan adalah dengan merencanakan kebutuhan (formasi) berdasarkan pada permintaan organisasi, meskipun hal ini telah dilakukan sebelum Reformasi Birokrasi digaungkan. Langkah selanjutnya adalah dengan memastikan bahwa ASN yang terjaring dalam proses rekrutmen sebagai pemenuhan formasi merupakan ASN yang profesional dan memiliki kualitas yang unggul. Diberlakukannya sistem CAT (*Computer Assisted Test*) pada proses rekrutmen CPNS yang bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, karena prosesnya yang *real time* merupakan salah satu upaya memilih bibit ASN yang berkualitas. Kemudian, masih menilik dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, demi terwujudnya ASN yang unggul dan berdaya saing tinggi, diterapkannya *Talent Pool* ASN Nasional. *Talent Pool* ASN Nasional memberi kesempatan pada para ASN untuk dapat menduduki pejabat tinggi melalui sistem seleksi yang bersifat promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi, dan kinerja.

Namun, umumnya pada persyaratan seleksi jabatan pimpinan tinggi mensyaratkan minimal 5 - 10 tahun bekerja di dalam bidang yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan yang akan diduduki. Jika pada saat proses rekrutmen, seorang CPNS yang memiliki bibit unggul berusia 35 tahun (usia maksimal persyaratan penerimaan), maka kemungkinan peluang yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi adalah ketika berusia 40 sd 45 tahun. bahkan lebih. Usia yang masih tergolong muda dan produktif, namun jika tidak dipersiapkan sejak masuk ke dalam sistem manajemen ASN, maka bibit-bibit unggul tersebut kemungkinan akan gagal tumbuh atau bisa jadi mengalami fase yang disebut *career plateau*. *Career plateau* adalah fase dimana seorang pegawai merasa tidak bisa berkembang lagi, tidak hanya karena yang bersangkutan sudah menduduki posisi tertinggi, namun justru bisa muncul di awal karir karena ketidakjelasan pola karir secara personal. Tanda-tanda seseorang mengalami *career plateau* adalah ketika seseorang merasa bosan dengan pekerjaan yang repetitif dan monoton, serta tidak punya keleluasan untuk mengembangkan diri (*boreout syndrom*). Sebuah situasi yang sangat familiar ditemukan dalam lingkungan kerja pemerintahan. Waktu tunggu lebih dari 5 - 10 tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk memberikan peluang munculnya gejala-gejala fase tidak berkembang ini.

Lalu apa yang bisa dilakukan dalam hal pencegahan gejala *career plateau* dan *boreout syndrom* pada ASN ini? Memberikan kesempatan adil dan seluas-luasnya kepada ASN untuk mendapatkan *refreshment* atau penyegaran. *Refreshment* dapat berupa pengembangan kompetensi dan keahlian adalah salah satu dari sekian banyak upaya untuk menghindari *boreout syndrom*. ASN diberikan kepercayaan untuk menghadapi tantangan baru di luar lingkungan kerjanya. Mereka diberikan waktu sementara untuk mendistraksikan diri dan pikiran keluar dari rutinitas pekerjaan. Kesempatan memperoleh pengembangan kompetensi dan keahlian tidak hanya membuat ASN mendapatkan variasi dalam pola kerjanya, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas diri ASN itu sendiri.

Namun begitu, jika memang penataan ASN sebagai fokus Reformasi Birokrasi hanya sebatas mengatur tentang bagaimana *the right man on the right place* terwujud, maka kualitas ASN yang diharapkan unggul dan berdaya saing tinggi tidak akan bisa dipertahankan lama, sebab pengembangan ASN tidak diatur dalam sebuah sistem yang komprehensif, tapi dibebankan kepada personil secara mandiri. Di dunia pemerintahan dengan ruang gerak yang masih terbatas, mungkinkah setiap ASN bisa berkembang secara mandiri?

Kunci utama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode ketiga ini memang fokus dan prioritas, dimana fokus adalah melihat secara utuh pada akar masalah tata kelola pemerintahan, sementara prioritas memberikan keleluasaan pada instansi pemerintah untuk memilih perbaikan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Pada 2 (dua) kunci utama ini jelas memberikan kebebasan bagi instansi pemerintahan untuk menentukan area mana yang didahulukan perubahannya, sehingga dapat secara riil menjawab langsung permasalahan di lapangan. Kebebasan ini seolah memberikan sedikit angin segar untuk dapat terciptanya sistem pengembangan ASN yang terstruktur, jika penataan sumber daya aparatur secara spesifik melalui peningkatan kualitas merupakan fokus perubahan yang dirasa sangat prioritas bagi instansi tersebut, meskipun hanya bersifat parsial. Ada pola pengembangan melalui Manajemen ASN yang membuka peluang kreativitas bagi setiap instansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya.

Meski pengelolaannya dikembalikan kepada instansi pemerintahan masing-masing dalam hal meningkatkan kualitas ASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebenarnya telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN Menuju SMART ASN 2024. Suatu kebijakan untuk menciptakan profil pegawai sebagai SMART ASN yang merupakan bagian dari perwujudan birokrasi berkelas dunia. Profil pegawai sebagai penentu kualitas pegawai melalui SMART ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, *hospitality*, *networking*, penguasaan teknologi, bahasa asing, dan *enterpreneurship*.

Fokus dan prioritas instansi dalam penataan SDM Aparatur sebenarnya dapat merujuk pada citra diri yang ditampilkan dalam profil SMART ASN. Keputusan untuk membuat sistem pengembangan ASN melalui peningkatan kualitas aparatur yang terstruktur harus juga mengukur gambaran apa yang ingin diperoleh dari pengembangan tersebut. Tidak hanya sekedar memberikan *refreshment* atau penyegaran bagi ASN yang mulai mengalami "*boreout syndrom*", tetapi juga beririsan hasilnya dengan perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berkelas Dunia.

Pemerintah memiliki waktu kurang dari 2 (dua) tahun untuk tercapainya tata kelola pemerintahan berkelas dunia. Jika melihat komposisi per generasi per jabatan, maka mereka, para pemangku kebijakan saat ini di instansi pemerintahan tingkat nasional dan lokal, sebagian besar adalah dari Generasi X dan Generasi Y, serta menyisakan sedikit dari Generasi *Baby Boomers*. Generasi X dan Generasi Y merupakan generasi yang mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dua generasi ini mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap disrupsi di segala elemen, sehingga dalam waktu yang sempit ini, harapan besar bangsa Indonesia dalam perwujudan tata kelola pemerintahan berkelas dunia khususnya pada penataan SDM Aparatur dapat diakselerasikan dengan segera. Di tangan mereka, kebijakan pengembangan ASN yang tersistematis melalui proses *refreshment* dan profil SMART ASN dapat cepat cepat terlaksana sehingga bisa menjaga kualitas bibit unggul ASN lebih lama. Harapannya, nantinya mereka yang telah dipersiapkan dalam waktu tunggu tadi dapat menjadi ASN yang profesional dan juga siap menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan kelas dunia.



**Penulis :**  
**Teresa Irimina Nangameka,**  
**S.STP., M.Tr.I.P**

Dosen - Asisten Ahli pada  
Fakultas Manajemen  
Pemerintahan

## PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam rangka memperingati dies natalis ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri menggelar serangkaian acara untuk menyambutnya. Selain seminar nasional dan stadium general, beberapa kegiatan pengabdian masyarakat pun dilaksanakan IPDN baik di kampus pusat Jatinangor maupun di kampus daerah, diantaranya kegiatan donor darah, pelaksanaan SIM keliling dan sunatan massal. Kegiatan yang berbasis pengabdian untuk masyarakat ini dimulai dengan pelaksanaan Sim Keliling yang dilaksanakan selama 2 tahap yakni pada tanggal 4 Maret 2023 dan 11 Maret 2023 yang keduanya dilaksanakan di Gedung Balairung Rudini kampus IPDN Jatinangor.

IPDN juga melaksanakan kegiatan khitanan massal yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 dan bertempat di Poliklinik IPDN. Kegiatan ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Tentara Jajaran KESDAM III Siliwangi. Selain melakukan khitanan massal, IPDN juga memberikan santunan dan beberapa perlengkapan sekolah, sarung, ikat pinggang pelindung, snack dan makan siang kepada 51 orang anak yang mengikuti kegiatan ini.

Sebelumnya pada tanggal 4 dan 11 maret 2023 IPDN juga menggelar kegiatan pelayanan sim keliling bagi civitas akademika IPDN dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Polres Sumedang.



Dua hari sebelum acara puncak peringatan dies natalis ke-67 IPDN, dilaksanakan pula kegiatan donor darah yang bertempat di Gedung Balairung Rudini kampus IPDN Jatinangor. Sejumlah 400 kantong darah didapat dari praja dan civitas akademika IPDN yang melakukan donor darah.

Tak ingin kalah dengan IPDN kampus Jatinangor, praja dan civitas akademika IPDN kampus Jakarta juga melakukan bakti sosial dalam rangka dies natalis ke-67 IPDN. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dengan mengadakan kerja bakti di Kecamatan Pasar Minggu RT 11/ RW. 4 Kelurahan Cilandak Timur. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ibu Sekretaris Camar dan seluruh komponen masyarakat di sekitar wilayah pasar minggu.



## PRAJA PEDIA

Drumband kebanggaan IPDN yakni Gita Abdi Praja (GAP) kembali diberikan kepercayaan untuk turut terlibat memeriahkan pelaksanaan kegiatan HUT Kota Jayapura ke-113 pada tanggal 7 Maret 2023. Selain GAP, pasukan pembawa tanda kehormatan IPDN kampus Papua juga turut ikut serta dalam perayaan milad Kota Jayapura ini. Total sebanyak 100 orang praja diterjunkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Selain GAP di kampus Papua, GAP di IPDN kampus Kalimantan Barat juga ditunjuk untuk ikutserta memeriahkan rangkaian HUT Pemerintah Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan tanggal 11 Maret 2023.



IPDN kampus Kalimantan Barat juga turut memeriahkan pelaksanaan dies natalis ke-67 dengan diadakannya rangkaian kegiatan pada sejak tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023. Kegiatan tersebut diantaranya kegiatan tari tradisional yang diikuti oleh seluruh siswa/i SMA sederajat se-Kalimantan Barat pada tanggal 13 Maret 2023 serta kegiatan lomba debat antar mahasiswa yang diikuti oleh beberapa perwakilan perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang diadakan pada tanggal 14 s.d. 15 Maret 2023.



## Treasure Goes to IPDN 2023



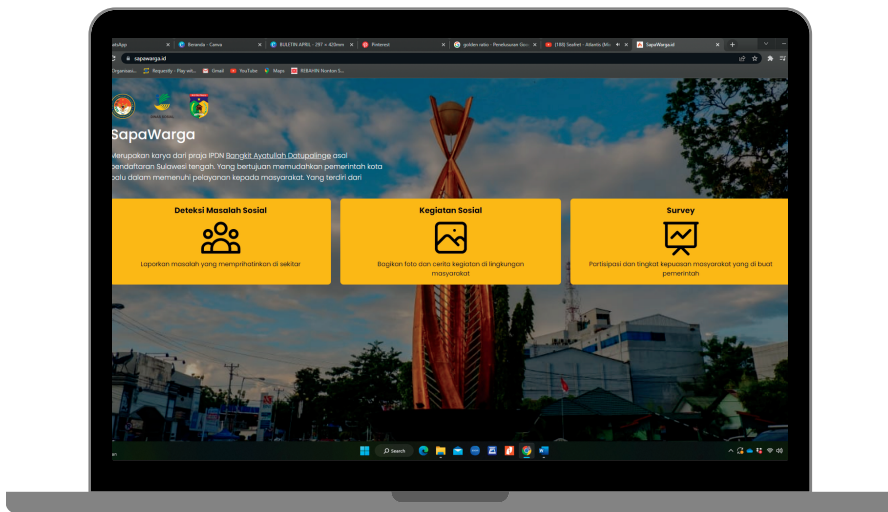
Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pembedaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan. KPPN melaksanakan sosialisasi terkait tata Kelola keuangan negara yang berfokus pada APBN 2023 baik dari perencanaan hingga penganggaran serta pendalaman pada sumber pendapatan negara. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 14 Maret 2023 dan diikuti oleh satuan madya praja di IPDN kampus Jakarta





## SAPAWARGA.ID aplikasi karya praja IPDN yang meraih Juara I lomba Inovasi

SAPAWARGA.ID merupakan aplikasi berbasis website karya 3 (tiga) praja berprestasi IPDN yakni Bangkit Ayatullah Datupalinge (asal pendaftaran Sulawesi Tengah), I Kadek Dodi Andika Pratama (asal pendaftaran Bali) dan Diskha Febriyan Prasutra (asal pendaftaran Jawa Timur). Ketiga praja ini berhasil meraih juara 1 lomba inovasi antara perguruan tinggi dengan mengangkat aplikasi SAPAWARGA.ID yang merupakan aplikasi dalam bidang pelayanan publik guna mendeteksi masalah sosial bagi masyarakat di Kota Palu. Inovasi ini sendiri merupakan gambaran dari sapawarga Jawa Barat dan laporpakwali yang kemudian dirancang sedemikian rupa agar terlihat berbeda dan memiliki fungsi di salah satu organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Sosial Kota Palu.



Fitur yang terdapat dalam aplikasi ini meliputi menganalisis masalah sosial, kegiatan sosial, survey kepuasan masyarakat, progress status pengaduan dan bentuk tindak lanjut atas pengaduan. Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan inovasi aplikasi sapawarga.id ini dilakukan secara terus menerus yang tujuannya untuk menilai dan mengukur sejauh mana kualitas hasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat serta keefektifan dan efisiensi kerja dalam organisasi perangkat daerah yang di tuju. sehingga dampak yang dihasilkan terutama sebagai wujud dari kesejahteraan masyarakat terus optimal. Untuk metode evaluasi yang selama ini dilakukan dengan berdasarkan pendekatan input dan output, yaitu dengan melihat atau mengukur setiap 11 pelaksanaan pengisian data sehingga mengetahui dampak perubahannya yang sekaligus mengukur kendala dan hambatan yang selama ini dihadapi dalam inovasi aplikasi berbasis website sapawarga.id. Berikut merupakan profile praja berprestasi yang telah berhasil membuat inovasi terkait pelayanan publik.



**Nama :** Bangkit Ayatullah Datupalinge  
**TTL :** Palu, 08 Maret 2002  
**Asdaf :** Sulawesi Tengah  
**NPP :** 31.0856  
**Fakultas :** Manajemen Pemerintahan  
**Prodi :** Administrasi Pemerintahan Daerah

### Riwayat Pendidikan

**SD :** SDN Inpres Perumnas Kota Palu  
**SMP :** SMP Al-azhar Mandiri Palu  
**SMA :** SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo , Jawa Tengah

### Prestasi :

1. Juara 2 Lomba Essai Tingkat Nasional Dalam Rangka Pekan Prestasi Nasional UPN Veteran Jakarta Tahun 2022
2. Perwakilan IPDN Dalam Rangka Konferensi Internasional Sosial dan Humaniora Malaysia 15-16 Mei Tahun 2023 Universitas Kebangsaan Malaysia Melalui Seleksi Karya Tulis
3. Juara 1 Lomba Inovasi Pelayanan Pemerintahan Tingkat se-Bandung Raya dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Dies Natalis IPDN ke-67 Tahun 2023

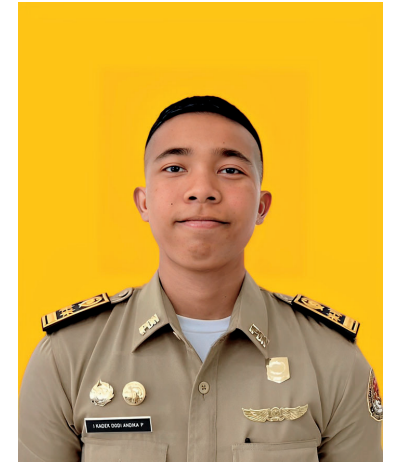
**Nama :** I Kadek Dodi Andika Pratama  
**TTL :** Karangasem, 11 April 2000  
**Asdaf :** Bali  
**NPP :** 31.0720  
**Fakultas :** Politik Pemerintahan  
**Prodi :** Politik Indonesia Terapan

### Riwayat Pendidikan

**SD :** SDN 4 Bugbug  
**SMP :** SMPN 2 Amlapura  
**SMA :** SMAN 2 Amlapura

### Prestasi :

1. Perwakilan IPDN dalam diklat kepemimpinan oleh Kemenpora di Mabes TNI
2. Juara 1 Inovasi Pemerintahan Dies Natalis IPDN 2023
3. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Dies Natalis IPDN 2023



**Nama :** Diskha Febriyan Prasutra  
**TTL :** Pamekasan, 22 Februari 2001  
**Asdaf :** Jawa Timur  
**NPP :** 31.0531  
**Fakultas :** Manajemen Pemerintahan  
**Prodi :** Administrasi Pemerintahan Daerah  
**Riwayat Pendidikan**

**SD :** SDN 2 Lawangan Daya  
**SMP :** SMPN 2 Pamekasan  
**SMA :** SMAN 1 Pamekasan

### Prestasi :

1. Juara 1 Lomba Inovasi Pelayanan Pemerintahan Tingkat se-Bandung Raya dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Dies Natalis IPDN ke-67 Tahun 2023
2. Juara 3 Lomba Futsal Dies Natalis IPDN ke-66 Tahun 2022



# KEGIATAN PRAJA DI BULAN RAMADHAN

Dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H, praja IPDN giat melakukan beberapa bakti sosial di lingkungan kampus IPDN Jatinangor, diantaranya ialah membagikan takjil kepada masyarakat sekitar yang melewati kampus IPDN sesaat sebelum waktu berbuka. Pelaksanaan bagi-bagi takjil ini dilakukan 2x setiap minggu. Praja menyiapkan beberapa takjil seperti kolak dan kue basah untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Tak hanya berbagi takjil, praja IPDN pun mengisi bulan Ramadhan ini dengan mengunjungi Pondok Pesantren Yayasan Assholihiyah Ahlul Haq di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Pada saat kunjungannya, praja IPDN menyempatkan diri untuk solat berjamaah, mendengarkan kultum subuh dan tadarus bersama anak-anak di pondok pesantren tersebut. Mereka pun tak lupa untuk memberikan bingkisan kepada anak-anak di pondok pesantren Assholihiyah.



Bulan puasa tahun ini, dijadikan sebagai sarana mendulang pahala oleh praja IPDN. Tak hanya rangkaian bakti sosial yang telah disebutkan diatas, beberapa kegiatan pun dilakukan praja IPDN memeriahkan bulan Ramadhan tahun ini. Beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan Praja IPDN di bulan Ramadhan ini yakni mendengarkan kultum subuh yang disampaikan di masjid Daarul Maarif IPDN, kegiatan tadarus dan khotmil Qur'an, shalat tarawih berjamaah, safari ramadhan, berbagi takjil, bakti sosial dan penghimpunan zakat fitrah.



# BUDIDAYA KANGKUNG DI IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

Rabu (12/4/2023), praja IPDN di kampus Sulawesi Selatan mengadakan panen perdana kangkung yang ditanam sendiri di area kampus IPDN Sulawesi Selatan. Budidaya kangkung ini sendiri merupakan salah satu program kerja unggulan Bapak Direktur Kampus Sulawesi Selatan Prof. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si yang dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Selain kangkung, praja IPDN sejak dulu sudah mulai melakukan budidaya tanaman buah-buahan, dan tanaman pangan seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung dan kacang tanah di lahan pertanian berukuran 1,5 hektar. Menurut Kepala Unit Budidaya IPDN kampus Sulawesi Selatan, Dedy Irdamsyah Hatta, budidaya kangkung ini merupakan program kerja unggulan bapak direktur dalam penanaman nilai-nilai pamong praja bagi satuan praja terutama praja ipdn sulsel dengan prodi kebijakan public serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. "Diharapkan hal ini dapat menjadi bekal pada saat mereka bertugas nanti di daerah juga dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat dengan ilmu pemerintahannya dan sedikit banyak dengan ilmu pertanian", ujarnya.



Hasil budidaya pertanian ini sementara hanya dikonsumsi untuk makan praja namun melihat hasil panen yang baik ini, kedepannya akan digagas untuk dapat dijual belikan sebagai tambahan untuk pemasukan kas sena praja. Tak hanya pertanian, praja di IPDN kampus Sulawesi Selatan juga diberikan keterampilan dalam budidaya perikanan dan peternakan.





Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H





Informasi akses baca dan pengiriman konten bulletin

Redaksi menerima tulisan/ulasan/artikel/artikel ilmiah/opini/foto yang berkaitan dengan informasi kegiatan.

Redaksi akan menyunting tulisan/ulasan/artikel/artikel ilmiah/opini/foto yang diterima dan akan menyesuaikannya dengan tema dan ketersediaan rubrik/halaman dalam setiap edisinya.

Naskah/artikel dapat dikirimkan melalui email : [humasipdnnews@gmail.com](mailto:humasipdnnews@gmail.com) atau menghubungi Nindy (081312112159)